



JAWA POS

DIPERIKSA: Mantan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas saat memenuhi panggilan KPK beberapa hari lalu.

Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji Kerugian Negara Tembus Rp1 Triliun

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan potensi kerugian negara dalam kasus dugaan korupsi kuota haji 2024 mencapai lebih dari Rp 1 triliun. Angka ini berdasarkan

perhitungan internal KPK yang telah dikomunikasikan dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Di mana dalam perkara ini, hitungan awal, dugaan kerugian negaranya lebih dari

Rp 1 triliun," kata Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/8).

Budi menjelaskan,

◆Ke Halaman 7 kolom 1



Kerugian Negara Tembus Rp1 Triliun

Sambungan dari halaman 1

pihaknya bekerja sama dengan BPK untuk menghitung secara pasti nilai kerugian negara. Perhitungan yang dilakukan BPK akan memerinci jumlah final kerugian dari dugaan penyimpangan kuota haji tersebut.

"Tentu nanti BPK akan menghitung secara lebih detail lagi. Jadi angka yang didapatkan dari hitungan awal adalah lebih dari Rp 1 triliun," ujarnya.

KPK akan mendalami pihak-pihak yang diduga mengubah pembagian kuota haji tambahan sebesar 20 ribu jemaah sehingga tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 UU No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari total kuota haji Indonesia, sisanya 92 persen untuk haji reguler. Dalam aturan tersebut, tambahan 20 ribu kuota haji seharusnya dibagi untuk 18.400 jamaah haji reguler, setara 92 persen dan 1.600 jamaah haji khusus, setara 8 persen.

Dengan demikian, kuota haji reguler seharusnya naik dari 203.320 menjadi 221.720 orang. Sementara kuota haji khusus bertambah dari 17.680 menjadi 19.280 orang. Namun, fakta menunjukkan bahwa pembagian yang terjadi justru 50:50 atau masing-

masing 10 ribu untuk haji reguler dan haji khusus.

"Di situ ada pergeseran dari yang seharusnya 92 persen untuk haji reguler, 8 persen untuk haji khusus, karena ada pergeseran jadi 50:50 atau 10.000:10.000. Tentunya ada pergeseran di situ," tegas Budi.

Bidik Pejabat Kemenag hingga Agen Travel

Menurut dia, penyidik akan menelusuri siapa yang memberi perintah perubahan kuota tersebut serta menelusuri dugaan aliran dana yang dikelola agen penyelenggara ibadah haji khusus.

"Kita akan lihat apakah ada aliran uang ke pihak tertentu. Jika ada, siapa saja pihak-pihak itu, semuanya akan ditelusuri oleh KPK," urainya.

Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, juga menyampaikan pihak-pihak yang berpotensi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji adalah yang ditinggalkan dari pengadaan haji khusus yang sedianya merupakan kuota haji reguler.

"Orang-orang yang mendapat aliran dana dalam konteks karena pembagian kuota," kata Asep, Senin (11/8). Sejauh ini, meski telah menaikkan status ke penyidikan, KPK belum menetapkan siapapun sebagai tersangka.

"Misalkan dari pihak pe-

merintah, oknum pihak pemerintah atau Kementerian Agama yang karena keputusannya memberikan kuota haji ini tidak sesuai dengan aturan, kemudian mendapatkan sejumlah uang. Nah, itu akan menjadi objek untuk kami minta pertanggungjawaban," lanjut Asep.

"Kemudian juga, tentunya perusahaan-perusahaan ya, perusahaan travel di mana mereka yang seharusnya tidak menerima kuota tersebut," sambungnya.

Buka Peluang Panggil Jokowi

Dalam menangani kasus ini, KPK juga membuka kemungkinan memanggil Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Sebab, kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji diduga terjadi pada masa akhir pemerintahan Jokowi.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menegaskan lembaga antirasuah tidak akan tebang pilih dalam memanggil saksi-saksi untuk dimintai keterangannya. Pemanggilan saksi-saksi, termasuk terhadap Jokowi, sepenuhnya bergantung pada kebutuhan penyidik.

"KPK terbuka untuk memanggil siapa saja yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini dan dapat membantu membuka serta membuat terang penanganan perkara ini," kata Budi di

Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (11/8).

Keterkaitan nama Jokowi muncul karena tambahan kuota 20 ribu jemaah merupakan hasil lobi Presiden ke-7 RI tersebut kepada pemerintah Arab Saudi. Tambahan kuota ini dimaksudkan untuk memangkas daftar antrean calon jamaah haji reguler, kurang lebih selama 15 tahun. Namun, dugaan korupsi terjadi karena pembagian kuota tambahan ternyata tidak sesuai ketentuan.

Sebelumnya diberitakan, KPK secara resmi mengumumkan perkara dugaan korupsi terkait penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji di Kementerian Agama (Kemenag) 2023-2024 naik ke tahap penyidikan. Langkah ini diambil setelah KPK melakukan penyelidikan melalui permintaan keterangan sejumlah pihak. Salah satunya mantan Menteri Agama (Menag) Yaquut Cholil Qoumas.

"KPK telah menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana korupsi terkait dengan penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023-2024 sehingga disimpulkan untuk dilakukan penyidikan," ucap Plt Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Sabtu (9/8) dini hari. (jp)